KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Produk lokal sulit bersaing tanpa SNI, kotak tisu DPR pun impor
Tanggal : Rabu, 12 Juni 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Produk Lokal Sulit Bersaing Tanpa SNI

Kotak Tisu DPR Pun Impor

Anggota Komisi VI DPR Muhammad Husni menyesalkan rendahnya daya saing produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di dalam negeri. Bahkan DPR untuk urusan kotak tisu saja, ternyata barangnya berasal dari China, bukan milik UMKM.

HUSNI mengatakan, persoalan Standar Nasional Indonesia (SNI) harus menjadi perhatian. Ternyata tidak mudah bagi UMKM untuk dapat mengantongi sertifikat SNI dari Badan Standardisasi Nasional (BSN). Sementara, kantor BSN ini sangat terbatas, hanya ada di Jakarta, dengan lima kantor perwakilan di Indonesia.

"Kalau masalah anggaran (BSN) tidak ada masalah, cuma SNI ini. Saya melihat dari mulai pendaftaran sampai dikeluarkannya SNI ini memakan waktu yang begitu panjang. Dan ini rata-rata (dihadapi) untuk produk-produk lokal," sesal Husni dalam rapat kerja Komisi VI DPR bersama Kementerian Koperasi dan UMKM, BSN, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.

Dia lalu memperlihatkan kotak tisu milik Kesetjenan DPR yang ada di depan mejanya. Kotak tisu yang masuk ke DPR ini merupakan buatan China. Dia mengaku tahu betul produk ini karena barang tersebut diproduksi produksi di Yiwu, Provinsi Zhejiang, China. "Mohon maaf pak, ini sudah puluhan tahun masuk kemari, tidak ada SNI-nya pak. Tidak ada," tegasnya.

Dia pun menyesalkan rendahnya daya saing produk lokal ini. Ironinya, produk-produk impor ini sangat gampang masuk ke Indonesia. "Jadi kita kadang-kadang mempersulit untuk bangsa kita sendiri, tapi barang-barang impor begitu gampang masuk ke tempat kita, tanpa ada proteksi apapun," sesalnya.

Politisi Fraksi Gerindra ini lalu mengkritik kinerja BSN yang tidak sebanding dengan jumlah UMKM yang ada di Indonesia. "Jadi mohon maaf kalau saya baca pencapaian kinerja BSN tahun 2024, skema akreditasi ada 17, pengakuan internasional atas kemampuan pengukuran kalibrasi 148, sementara negara kita 270 juta jiwa penduduknya. Tidak sebanding ini pak. Betul-betul tidak sebanding," kritiknya.

Muhammad Husni

Karena itu, dia mendorong BSN memperluas cakupan pelayanan untuk UMKM. Salah satunya, dengan menambah kantor-kantor perwakilan dari yang ada saat ini. "Jadi jangan lagi ada istilah, kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah. Ini saya pikir tidak laku lagi pak. Artinya, kalau bisa dipermudah, jangan pernah dipersulit," tegasnya.

Menurutnya, kotak tisu dari China ini hanyalah salah satu contoh kenapa daya saing produk dalam negeri sulit mengatasi produk-produk impor. Padahal sebagian besar produk-produk impor yang masuk ini, pajak dan bea masuknya sudah ditingkatkan. "Tapi apakah bapak pernah tahu, kalau banyak negara melakukan dumping Pak. Banyak negara melakukan restitusi pajak kalau dia bisa ekspor," jelasnya.

Husni mengatakan, China benar-benar menerapkan restitusi pajak hingga 12,5 persen untuk produk ekspornya. Dia mengaku tahu betul soal restitusi pajak di China ii, karena dulunya impor barang dari China.

"Barang-barang itu kalau bisa ekspor, 12,5 persen dapat restitusi. Berarti kalau dia jual barang dengan harga modal dia, dengan teknologi yang mohon maaf sampai hari ini kita belum sanggup bersaing, itu dia sudah untung 12,5 persen," sebutnya.

Untuk itu, dia berharap Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bisa ikut mendalami ini. Apalagi KPPU ini banyak berurusan dengan persoalan mengenai produk-produk monopoli. "Karena kalau tergerus terus industri-industri kita dalam negeri, pengusaha-pengusaha kita dalam negeri, habis kita pak. Pangsa pasar kita 270 juta, luar biasa besarnya. Semoga ada pembelajaran-pembelajaran yang kita dapatkan," tambahnya.

Sementara Sekretaris Utama BSN Donny Purnomo mengatakan, pihaknya sejak tahun lalu telah berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UMKM agar sertifikasi UMKM lebih efisien. "Jadi BSN mengintegrasikan diri ke dalam PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) supaya sertifikasi untuk UMKM bisa lebih mudah dan satu pintu," kata Donny. ■ KAL